

**ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN
DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabuapten Cirebon)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :
HARIYONO
NIM. 2286040016

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)**

TESIS

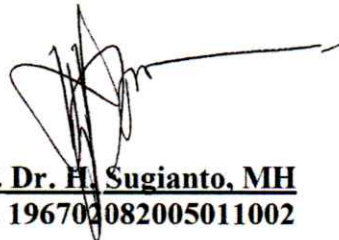
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam (MH)
Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Oleh:

HARIYONO
NIM. 2286040016

Telah disetujui pada Tanggal Maret 2024

Pmbimbing I,


Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 197704052005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

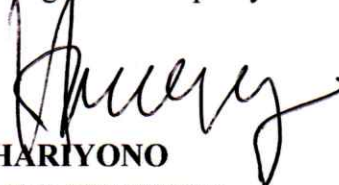
Nama : **HARIYONO**
NIM : 2286040016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada : Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: ***“ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)”*** secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Maret 2024

Yang membuat pernyataan



HARIYONO

NIM. 2286040016

Prof. Dr. H. Sugianto, MH
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
di
CIREBON

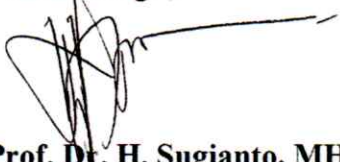
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara HARIYONO NIM. 2286040016 yang berjudul: "***ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)***" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atasperhatian Saudara, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Maret 2024
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara HARIYONO NIM. 2286040016 yang berjudul: ***"ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)*** telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atasperhatian Saudara, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Maret 2024
Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19730526 200501 1 004

ABSTRAK

Hariyono, Nim 2286040016: “Analisis Penegak Hukum Terhadap Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)”

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat lambat. Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan penegak hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah? Bagaimana peranan suami dan istri dalam rumah tangga dalam perbuatan melawan hukum formil maupun hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penegak hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan mengetahui dan menganalisis peranan suami dan istri dalam rumah tangga dalam perbuatan melawan hukum formil maupun hukum Islam.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam undang-undang tersebut terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketika pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka harus diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang dan Pejabat Pemerintah

ABSTRACT

Hariyono, Nim 2286040016: "Law Enforcement Analysis of Corruption Committed by Government Officials in Connection with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (Case Study at the Cirebon Regency District Prosecutor's Office)"

Discussions about corruption seem to never end. This phenomenon is indeed very interesting to study, especially in a situation like the current one, where there are indications that reflect people's distrust of the government. The demand for clean government is getting louder, following the recent economic crisis, as well as very slow economic growth in Indonesia. This corrupt behavior of central and regional government bureaucratic officials certainly has an impact on the development process and services to society, where civil servants as state servants and public servants who should be the spearhead in realizing a government free from corruption, collusion and nepotism, but instead become perpetrators of criminal acts. corruption as is often the case today.

The problem of this research is what is the view of law enforcement in eradicating corruption? How is law enforcement against criminal acts of corruption committed by government officials? What is the role of husband and wife in the household in acts against formal law and Islamic law?

The purpose of this research is to find out and analyze the views of law enforcers in the Eradication of Corruption Crimes, to find out and analyze law enforcement against criminal acts of corruption committed by government officials and to know and analyze the role of husbands and wives in the household in acts against formal and legal laws. Islam.

This research method was carried out using qualitative research, a research and understanding process based on a methodology that investigates social phenomena and human problems.

The results of this research conclude that the results of this research conclude that the regulations regarding criminal acts of corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of criminal acts of corruption cannot be said to be optimal and need a lot of improvement, especially in matters of law enforcement. And what needs to be emphasized in this law is especially regarding replacement money imposed on perpetrators of criminal acts of corruption, because the sanction for providing replacement money is an effort to save and return state money that has been corrupted and is an effort to impoverish the perpetrators of corruption so that this will deter corrupt perpetrators and prevent other potential perpetrators from committing criminal acts of corruption. When the government abuses its authority, it must be processed according to the applicable law in accordance with the actions it commits.

Keywords: *Crime, Abuse of Authority and Government Officials*

الملخص

هاريونو، نيم 2286040016: "تحليل إنفاذ القانون للفساد الذي يرتكبه المسؤولون الحكوميون فيما يتعلق بالقانون رقم 20 لعام 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد (دراسة حالة في مكتب المدعي العام لمنطقة "(سيريبون ريجنسي

لا تنتهي أبداً. إن هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام حقاً يبدو أن المناقشات حول الفساد للدراسة، خاصة في وضع مثل الوضع الحالي، حيث توجد مؤشرات تعكس عدم ثقة الناس بالحكومة. يزداد الطلب على الحكومة النظيفة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فضلاً عن النمو الاقتصادي من المؤكد أن هذا السلوك الفاسد للمسؤولين. البطيء للغاية في إندونيسيا البيروقراطيين في الحكومة المركزية والإقليمية له تأثير على عملية التنمية والخدمات المقدمة للمجتمع، حيث ينبغي للموظفين المدنيين كموظفي الدولة والموظفين العموميين أن يكونوا رأس الحربة في تحقيق حكومة خالية من تواطؤ والمحسوبية، ولكن وبدلاً من ذلك يصبحون مرتكبي أعمال فساد إجرامية كما هو الفساد وال الحال في كثير من الأحيان اليوم.

ومشكلة هذا البحث هي ما هي رؤية أجهزة تطبيق القانون في القضاء على الفساد؟ كيف يتم تطبيق القانون ضد أعمال الفساد الإجرامية التي كوميون؟ ما هو دور الزوج والزوجة في الأسرة في الأعمال يرتكبها المسؤولون الح المخالفة للقانون الرسمي والشريعة الإسلامية؟

الغرض من هذا البحث هو معرفة وتحليل آراء القائمين على تطبيق القانون في القضاء على جرائم الفساد، لمعرفة وتحليل تطبيق القانون ضد ها المسؤولون الحكوميون ومعرفة وتحليل أعمال الفساد الإجرامية التي يرتكب دور الأزواج والزوجات في الأسرة في أعمال مخالفة للقوانين الرسمية والقانونية تم تنفيذ طريقة البحث هذه باستخدام البحث النوعي، وهي عملية بحث وفهم تعتمد على منهجية تبحث في الظواهر الاجتماعية والمشكلات الإنسانية.

هذا البحث إلى أن نتائج هذا البحث خلصت إلى أن خلصت نتائج اللوائح المتعلقة بأفعال الفساد الإجرامية المنصوص عليها في القانون رقم لسنة 1999 بالتزامن مع القانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن القضاء على أعمال 31، سين الفساد الإجرامية لا يمكن القبول بأنها الأمثل ويحتاج إلى الكثير من التح وخاصة في المسائل المتعلقة بإنفاذ القانون. وما يجب التأكيد عليه في هذا القانون خاصة فيما يتعلق بفرض أموال الاستبدال على مرتكبي أعمال الفساد الإجرامية، لأن عقوبة تقديم الأموال البديلة هي محاولة لإنقاذ وإعادة أموال الدولة دولة. مرتكبي الفساد بحيث يؤدي ذلك إلى ردع مرتكبي التي أفسدت، وهي محاولة لإفقار ال الفساد ويمنع الجناة المحتملين الآخرين من ارتكاب أعمال فساد إجرامية. عندما تسيء الحكومة استخدام سلطتها، يجب معالجتها وفقاً للقانون المعمول به وفقاً للإجراءات التي ترتكبها

ستعمال السلطة والموظفين الحكوميين الكلمات المفتاحية: الجريمة، إساءة ا

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: ***“ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon)”***. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, tuhan sang segala maha yang telah melimpahkan semua nikmat yang takkan pernah kudustakan.
2. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA. Dosen Pembimbing I.
5. Dr. Abdul Aziz, M.Ag, Dosen Pembimbing II.
6. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tindak Pidana	28
B. Keadilan <i>Restorative Justice</i>	36
C. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Tujuan Pemidanaan	56
BAB III : PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	64
A. Penerapan Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian	

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	64
B. Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	75
BAB IV : ANALISIS PENEGAK HUKUM TERHADAP KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kabuapten Cirebon)	87
A. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif	87
B. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	103
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterima kasih dan terbuka untuk menerima saran dankritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak / ibu / saudara /I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, Maret 2024

Penulis

